

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen salah satu aspek dalam laporan keuangan perusahaan. CSR merupakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Pangestika dan Widiastuti, 2017). Pengungkapan CSR dikatakan sebagai salah satu strategi untuk menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder* yang dapat dilakukan dengan cara memberi informasi mengenai kinerja perusahaan baik dalam aspek sosial maupun lingkungan. Dengan adanya pengungkapan CSR diharapkan dapat melengkapi kebutuhan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para *stakeholder* (Sumaryono dan Asyik, 2017). Manfaat CSR tidak hanya dirasakan oleh lingkungan sekitar tetapi dapat dirasakan oleh perusahaan yang akan dinilai positif oleh *stakeholder* atau juga para pemegang saham (Nurfadilah dan Sagara, 2016). Dalam praktiknya, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan masih menunjukkan informasi yang rendah, khususnya pada negara-negara berkembang (Anggraeni, 2020).

Fenomena yang terjadi pada tingkat kualitas pengungkapan CSR perusahaan masih sangat rendah atau belum maksimal (Burhany et al., 2020). Informasi pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia hanya 33% (Retno dan Priantinah, 2012) dan

sektor perbankan di Bangladesh melaporkan 47,39% informasi CSR pada laporan tahunannya (Ullah dan Rahman, 2015). Sementara di Indonesia industri dengan jumlah pelapor terbanyak setiap tahunnya yang terdaftar di ura Efef Indonesia sejumlah 73 perusahaan, terdapat 9 perusahaan atau 12,33% yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Pada tahun 2013, terdapat 13,33% atau 10 perusahaan dari 75 perusahaan dan pada tahun 2014 terdapat 13,58% atau 11 perusahaan dari 81 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan (Anggraeni dan Djakman, 2018).

Hal ini sangat penting bagi CSR untuk memastikan pelaporan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, pelaporan CSR merupakan hal yang penting dan membutuhkan peran akuntabilitas dan transparansi yang besar dari perusahaan karena, dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan investasi sehingga dapat meningkatkan citra dan kualitas perusahaan (Tasya dan Cheisviyanny, 2019). Jika perusahaan tidak memberi informasi maka investor tidak akan memilih saham di perusahaan tersebut, sehingga mengakibatkan harga saham suatu perusahaan jatuh yang dapat merugikan perusahaan, penelitian terkait dengan pengungkapan CSR telah dilakukan oleh Fatima dkk, (2015) menyimpulkan bahwa penyebab rendahnya kualitas pengungkapan dikarenakan belum adanya regulasi yang jelas mengatur pengungkapan CSR. Ragulasi yang tidak jelas ini menyebabkan praktik CSR hanya sekedar untuk mematuhi aturan yang berlaku saja sehingga target dari aktivitas CSR sendiri tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau para *stakeholder* (Tasya dan Cheisviyanny, 2019). Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi CSR yaitu Ukuran komite

audit (Pudjianti dan Ghozali, 2021), Rapat komite audit (Pudjianti dan Ghozali, 2021), Gender direksi (Indriyani dan Sudaryati, 2020), Ukuran dewan direksi (Krisna dan Suhardianto, 2016) dan Komisaris independen (Anggraeni, 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah Karakteristik komite audit. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komite audit memiliki karakteristik-karakteristik yang menunjukkan keefektifan dari kinerja komite audit, seperti independensi, jumlah rapat, keahlian keuangan, dan masa jabatan anggota komite audit (Kirana dan Prasetyo, 2021). Dengan karakteristik yang dimiliki komite audit diharapkan mampu untuk mengawasi kinerja manajemen lebih efektif sehingga perusahaan akan meningkatkan pengungkapan CSR (Pudjianti dan Ghozali, 2021).

Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih dalam anggota dewan komisaris termasuk dalam pengawasan kinerja perusahaan dan kinerja sosial, pengawasan kinerja sosial dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholder* (Pudjianti dan Ghozali, 2021). Kinerja pengawasan tersebut juga akan semakin baik ketika jumlah anggota komite audit cukup untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek kinerja perusahaan (Anggraeni, 2020). Komite audit merupakan salah satu bagian terpenting dari mekanisme *corporate governance* dalam hal transparansi dan kredibilitas atas semua kegiatan perusahaan, karakteristik komite audit cenderung dapat mempengaruhi pilihan manajerial salah satunya pengungkapan CSR (Utami et al., 2021). Semakin banyak jumlah anggota

komite audit yang dimiliki, kontrol terhadap kinerja sosial perusahaan akan semakin besar sehingga dapat meningkatkan dan memperluas pengungkapan tanggung jawab sosialnya (Krisna dan Suhardianto, 2016). Besarnya komite audit Abidin dan Lestari, (2020) dalam perusahaan, diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan yang lebih baik dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, sehingga dapat menjamin pelaksanaan CSR (Nugroho dan Yulianto, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2015), (Krisna dan Suhardianto, 2016), Fallah dan Mojarrad (2019), Abidin dan Lestari (2020), Restu (2017), Nurfadilah dan Sagara (2015) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Ratnasari (2011) menyatakan lebih banyak jumlah anggota dalam komite audit akan semakin baik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial sebab, mereka dapat mendukung dan memberi bantuan pada manajemen perusahaan dalam menginformasikan sesuatu hal yang lebih berkualitas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisna dan Suhardianto (2016), Nurfadilah dan Sagara (2016), Prasetyo (2018) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Erwanti dan Haryanto (2017), Habbash dkk (2016), Haribowo (2015), Pradana (2017) menunjukkan tidak adanya pengaruh komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Research gap pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan CSR perlu diuji kembali bahwa komite audit mampu lebih cepat menemukan

masalah, pengawasan dan pengendalian. Sehingga lebih efektif dalam meningkatkan kinerja manajemen dan pengungkapan CSR akan lebih luas (Pudjianti dan Ghozali, 2021). Semakin banyak jumlah komite audit maka semakin besar pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan (Rivandi dan Putri, 2019).

Rapat komite audit merupakan jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam waktu satu tahun (Pudjianti dan Ghozali, 2021). Jumlah rapat komite audit diukur dengan cara melihat jumlah rapat yang dilakukan komite audit pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan maupun laporan komite audit (Wulandini dan Zulaikha, 2012). Menurut Karamanou dan Vafeas (2005) menyatakan bahwa pertemuan rapat yang diadakan dapat memberikan waktu lebih banyak bagi komite audit untuk secara efektif melakukan peran pengawasan dan meningkatkan pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Anggota komite audit yang bertemu dalam setiap tahun cenderung lebih mudah dalam menemukan ketidaksesuaian dan memastikan reliabilitas dalam proses pengungkapan CSR. Rapat yang sering dilakukan juga dapat membantu komite audit untuk tetap mendapatkan informasi dan bersikap proaktif dalam menangani masalah terkait dengan pengungkapan CSR (Appuhami dan Tashakor, 2017).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa rapat komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2015) menemukan bahwa

pertemuan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Musallam (2018), Zahri (2020). Semakin banyak rapat komite audit yang dilakukan maka dapat memperkuat fungsinya dan pengungkapan CSR akan semakin luas (Pudjianti dan Ghozali, 2021). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haribowo (2015) mengatakan bahwa jumlah dewan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Research gap pengaruh rapat komite audit terhadap pengungkapan CSR perlu diuji kembali bahwa rapat komite audit mempunyai peran dalam membantu komite audit untuk mendapatkan informasi dan bersikap proaktif dalam menangani masalah terkait pengungkapan CSR (Appuhami dan Tashakor, 2017).

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan CRS adalah gender direksi (Indriyani dan Sudaryati, 2020). Keragaman gender dalam anggota dewan menunjukkan hubungan yang terkait dengan kinerja sosial perusahaan (Shamsul dan Abdullah, 2016). Adanya perempuan dalam anggota dewan memberikan pengaruh yang positif pada upaya perusahaan melakukan donasi dalam kegiatan *corporate social responsibility* dan pada akhirnya bisa meningkatkan reputasi perusahaan (Yasser dkk, 2017). Peran perempuan dalam dewan direksi terhadap CSR dengan melakukan pengungkapan yang bersifat sukarela maka akan dapat meningkatkan hubungan perusahaan dengan pihak lain, diantaranya adalah investor, perbankan, konsumen, suplier dan pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan (Farida, 2019).

Kaitannya dengan *stakeholder theory* yang menunjukkan bahwa direktur wanita dalam suatu perusahaan dapat membuat dewan direksi menjadi lebih inovatif dan transparan sehingga dapat mendorong perusahaan melakukan perubahan yang berasal dari tuntutan luar adanya perempuan dalam jajaran anggota dewan direksi dan dewan komisaris sehingga mampu meningkatkan intensitas pelaporan CSR (Hidayati, 2018). Khususnya kinerja perusahaan di bidang sosial karena wanita dianggap lebih peka dan sensitif terhadap isu-isu dan aspek sosial di lingkungan perusahaan sehingga dapat menjadi pendorong perusahaan untuk membangun sebuah hubungan yang baik dengan *stakeholder* (Farida, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahindayati dkk (2015), Pajaria dkk (2016), Katmon dkk (2019), Hadya dan Susanto (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh gender dewan direksi dan keberagaman gender dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Tasya dan Cheisviyanny (2019), Indriyani dan Sudaryati (2020), menyatakan bahwa adanya pengaruh positif gender diversity terhadap pengungkapan CSR. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rao dan Tilt (2016), Ibrahim dan Hanefah (2016) menyatakan bahwa jumlah dewan perempuan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Dengan demikian semakin banyak wanita yang berada dalam jajaran dewan maka akan meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektifitas hubungan dengan perusahaan lain, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan partisipasi kegiatan CSR yang lebih baik (Anggraeni, 2020).

Sebaliknya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhuang dkk (2018) menemukan Jumlah dewan perempuan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan Anggraeni (2020), Septianingsih dan Muslih (2019), Nanda dan Rismayani (2019), Alazzani dkk (2019) menemukan bahwa gender dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Research gap pengaruh gender direksi terhadap pengungkapan CSR perlu diuji kembali bahwa keberadaan perempuan dalam jajaran anggota direksi memiliki tanggungjawab yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan CSR (Anggraeni, 2020). Menurut Kusumastuti (2008) menjelaskan bahwa wanita dianggap lebih independen karena memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, sehingga dengan adanya wanita dalam jajaran dewan perusahaan akan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah (Hadya dan Susanto, 2018).

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu ukuran dewan direksi didefinisikan sebagai jumlah direktur yang duduk di sebuah perusahaan sehingga dapat mempengaruhi proses pemantauan, pengambilan keputusan dan pengungkapan (Ghabayen dkk, 2016). Upaya mempengaruhi laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan kepentingan manajer (Innayah dan Pratama, 2021). Semakin besar ukuran dewan suatu perusahaan maka semakin mudah untuk memonitor tugas

dari manajemen dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dan membuat manajemen semakin besar dalam melakukan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Chen, 2019). Barka dan Dardour (2015) menyatakan bahwa ukuran dewan mempunyai kaitan yang erat dengan ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung mempunyai ukuran dewan yang lebih besar (Setiawan, 2018). Selain itu, perusahaan besar mempunyai sumber daya yang lebih banyak, sehingga mereka mampu mempunyai dewan yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik (Anggraeni, 2020).

Jain dan Jamali, (2016) juga menyatakan bahwa ukuran dewan direksi merupakan komponen penting dalam suatu perusahaan dan menemukan bahwa sebagian besar penelitian mengenai ukuran dewan direksi dan CSR menunjukkan hasil yang positif. Pada sebuah perusahaan, dewan direksi dan dewan komisaris memiliki tugas yang berbeda (Krisna dan Suhardianto, 2016). Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi, sedangkan dewan direksi bertugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek (Sukandar, 2014).

Teori *stakeholder* menunjukkan bahwa direksi menjadi mekanisme kontrol utama dalam perusahaan dan bertanggung jawab kepada kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas (Rao dan Tilt, 2016). Teori *stakeholder* telah digunakan untuk menjelaskan kegiatan pelaporan dalam

banyak penelitian, menunjukkan bahwa pelaporan merupakan mekanisme akuntabilitas dan manajemen pemangku kepentingan (Setiawan, 2018).

Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barka dan Dardour (2015), Jain dan Jamali (2016), Krisna dan Suhardianto (2016), Fuente dkk (2017), Ramadhani dan Maresti (2021), Suwandy dan Rahayuningsih (2021), Mamun dan Seamer (2021) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dewan direksi sebagai elemen tertinggi dari pihak manajemen bertanggung jawab atas perolehan legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan (Anggraeni dan Djakman, 2017). Ukuran dewan direksi mencerminkan mekanisme tata kelola perusahaan karena pengambilan keputusan direksi akan mempertimbangkan pendapat anggota direksi. Semakin besar ukuran dewan direksi, maka akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Anggraeni, 2020).

Sebaliknya berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iswandi (2013) dan Oktafia dkk (2014), Kirana dan Prasetyo (2021) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfrianto (2014) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Research gap pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan CSR perlu diuji kembali bahwa, ukuran dewan direksi merupakan suatu yang

dapat mempengaruhi proses pemantauan, pengambilan keputusan dan pengungkapan (Ghabayen dkk, 2016). Semakin banyak ukuran direksi maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (Setiawan dkk, 2018).

Faktor keempat yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah komisaris independen (Anggraeni, 2020). Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada dewan direksi (Hidayati, 2018). Dewan komisaris sebagai perwakilan para pemilik saham berperan sebagai pengawas kinerja perusahaan, termasuk kinerja sosial perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dinyatakan dalam teori *stakeholder* (Krisna dan Suhardianto, 2016). Fungsi pengawasan lebih maksimal jika jumlah dewan komisaris memadai sehingga dapat meningkatkan tata kelola CSR dan kinerja sosial perusahaan (Indriyani dan Sudaryati, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Hanefah (2016), Naseem (2017), Biswas dkk (2018), Villegas dkk (2018), Anggraeni (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Dengan wewenang yang dimiliki dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi CSR lebih banyak (Nurfrianto, 2014). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwaidan dkk (2019), Faizah dan Novita (2020), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh

negatif terhadap pengungkapan CSR. Sebaliknya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2018) dan Anggraeni (2020) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Research gap pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan CSR perlu diuji kembali bahwa keberadaan komisaris independen mempunyai pengawasan yang baik terhadap kebijakan yang dibuat oleh direksi dan peran dari dewan komisaris tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan informasi kepada *stakeholder* sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Mistar dan Anis, 2020).

Penelitian ini mengembangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rivandi dan Putri (2019) mengenai Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen yaitu Rapat Komite Audit, Gender Direksi, Ukuran Dewan Direksi, dan Komisaris Independen. Pada dasarnya penelitian ini menunjukkan bahwa rapat komite audit yang sering dilakukan dapat membantu komite audit untuk tetap mendapatkan informasi dan bersikap proaktif dalam menangani masalah terkait dengan pengungkapan CSR (Appuhami dan Tashakor, 2017). Peran gender dalam dewan direksi terhadap CSR dengan melakukan pengungkapan yang bersifat sukarela maka dapat meningkatkan hubungan perusahaan dengan pihak lain, diantaranya adalah investor, perbankan, konsumen, suplier dan pihak lain yang berkepentingan terhadap

perusahaan (Farida, 2019). Ukuran dewan direksi dalam mekanisme tata kelola perusahaan bertugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek dan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan (Sukandar, 2014). Peran dari dewan komisaris independen dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kualitas pengungkapan yang dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Rivandi dan Putri (2019) yaitu terletak pada sampel perusahaan yang digunakan. Kemudian kelemahan dari penelitian (Rivandi dan Putri, 2019) yaitu Komposisi data yang digunakan didalam penelitian tidak begitu beragam, dimana masih terdapat sejumlah data yang digolongkan outlier sehingga berakibat pada hasil penelitian yang diperoleh dan masih terdapat sejumlah variabel yang tidak digunakan dalam penelitian tersebut seperti *corporate governance* dan berbagai variabel lainnya. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. Sedangkan dalam penelitian Rivandi dan Putri (2019) menggunakan sampel perusahaan HIGH PROFILE yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

Selain itu, sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan karena perbankan merupakan salah satu sektor yang diharapkan memiliki prospek yang cerah dimasa yang akan datang serta perusahaan perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran cukup besar dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara serta

menyediakan jasa pelayanan terhadap masyarakat dan menggunakan sumber daya publik yang besar yaitu tenaga kerja, sehingga perusahaan sektor perbankan akan mengedepankan hubungan baik dengan nasabah dan lebih bertanggung jawab terhadap bentuk pelayanan kepada masyarakat (Rahayu dan Cahyani, 2014).

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti **“PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT, GENDER DIREKSI, UKURAN DEWAN DIREKSI DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*”** (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
2. Apakah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
3. Apakah gender direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

5. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

C. Pembatasan Masalah

1. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan variabel independen yaitu ukuran komite audit, rapat komite audit, gender direksi, ukuran dewan direksi dan komisaris independen.
2. Perusahaan yang digunakan sebagai populasi ini yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di di BEI tahun 2017-2020.
3. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan perbankan tahun 2017-2020 dan website resmi www.idx.co.id

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif ukuran komite audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif rapat komite audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif gender direksi terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- d. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

- e. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif komisaris independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan dalam bidang yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh ukuran komite audit, rapat komite audit, gender direksi, ukuran dewan direksi, dan komisaris independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi akademis guna membantu akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan khususnya mengenai pengaruh ukuran komite audit, rapat komite audit, gender direksi, ukuran dewan direksi, dan komisaris independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.